

# Tak Semua Tersentuh Bantuan

**KEPALA** Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam Rayanis Aminah mengatakan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batam, jumlah fakir miskin per 26 September 2017 yang telah diverifikasi sebanyak 37.428 orang.

Awalnya jumlahnya 39.903 orang

dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam kemudian diserahkan ke Kementerian Sosial lalu diserahkan kabupaten dan kota untuk diverifikasi di lapangan. Setelah diverifikasi dengan dibantu camat, lurah dan fasilitator di tingkat kelurahan, angka tersebut berubah menjadi 37.428 orang.

Dari 37.428 fakir miskin di Kota Batam yang mendapat alokasi ban-

tuan dari pemerintah pusat hanya 32.493 orang. .

"Jadi itu yang harus yang kita lakukan, sehingga data itu nanti menjadi dasarnya kalau pemerintah mengeluarkan bantuan, seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang sekarang yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai kuota dari pusat," ujar dia.

Ke hal 4)))

# Tak Semua ...

((Dari hal 1

Saat ini KPM setiap bulannya mendapatkan Rp110 ribu yang dimasukkan ke kartu yang bisa dibelanjakan komoditi atau bantuan. Program BPNT ini merupakan tahun kedua di Kota Batam. Pada tahun 2017 yang merupakan tahun pertama program ini berjalan banyak yang harus dievaluasi, seperti mengevaluasi data KPM dan sebagainya. Pada tahun pertama tersebut KPM hanya mendapatkan bantuan per dua bulan. Kemudian di tahun 2018 ini, setiap bulan bantuan diterima oleh KPM. "Jadi setiap tanggal 24 uang sudah masuk di kartu masing KPM, dan tanggal 25 KPM sudah bisa menggesek kartunya dengan bantuan yang telah kita siapkan," jelasnya.

Menurutnya, KPM juga dinilai. Jika KPM tersebut dianggap sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya maka KPM tersebut tersebut tidak berhak lagi mendapatkan bantuan.

Tak hanya BNPT, ada PKH (Program Keluarga Harapan)

bantuan tersebut diberikan jika di satu rumah tersebut balita, disabilitas, ibu hamil, anak usia sekolah, dan ibu menyusui.

Selain BPNT terdapat juga program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang menjadi program Pemko Batam untuk mengurangi kemiskinan. Pemko Batam mengalokasikan setiap tahunnya, di 2017 ada 100 rumah namun diperuntukan untuk hinterland yakni Kecamatan Belakngpadang, Bulang, dan Galang. Untuk tahun ini, Pemko Batam juga mengalokasikan 100 rumah. Untuk mainland 40 rumah dan hinterland 60 rumah.

"Saat ini masuk tahap proses lelang, yang terdiri konsultan perencanaan, pengadaan barang, dan pengawasan rumahnya," katanya. Kemudian untuk pengerjaan, ditunjuk oleh pemilik rumah. Ada tiga tukang untuk mengerjakan dalam satu rumah, tukang tersebut dibayar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

"Mereka (kuli bangunan) melapor ke kami dan memberikan nomor rekeningnya. Dan sete-

lah barang datang mereka dikasih waktu dua minggu untuk mengerjakannya sesuai dengan yang kita tetapkan. Nilai renovasi itu sebesar Rp22 juta belum dipotong pajak," sebutnya.

## Banyak Dinas Ikut

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan Pemko Batam mempunyai cara dalam hal pengentasan kemiskinan di Kota Batam yakni terdapat kebijakan khusus yang terintegrasi dengan melibatkan OPD terkait. Di antaranya, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Sosial dan Pembedayaan Masyarakat (Dinsos-PM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Dinas Koperasi Usaha Mikro (KUM).

"Itu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memikirkan langsung kemiskinan di Kota Batam, yang berjumlah 37.428 orang," kata Amsakar.

Menurutnya, cara mengurangi angka kemiskinan tersebut dengan membuat program. Seperti pada program Disperindag Kota Batam yakni bazar sembako murah. Kemudian Disdik dengan programnya Jamkesda, BPJS Kesehatan yang tergantung dari APBD Kota Batam. Dinsos dan Pembedayaan Masyarakat dengan programnya RTLH, BPNT. Disdik dengan programnya pendidikan keluarga tak mampu, dan bantuan pendidikan anak hinterland. Selanjutnya, Disnaker diberikan sertifikasi tenaga kerja yakni pelatihan bagi 2320 orang, banyak bidang yang dilatih salah satunya bidang pariwisata.

"Selain itu Pemko Batam membantu untuk bazar sembako murah tahun berjalan ini 2.000 per kelurahan. Sebelumnya paket 6.300 per kecamatan," ujar dia.

Amsakar berharap, langkah untuk pengentasan kemiskinan ini didukung oleh masyarakat dan pelaku usaha. "Kalau Pemko Batam sendiri yang bekerja akan sulit mengurainya kalau

dilakukan bersama maka masalah ini akan cepat terselesaikan," kata dia.

## Langkah Pemprov Kepri

Wakil Gubernur Kepri Isdianto mengungkapkan dalam mengurangi angka kemiskinan di Provisis Kepri, dirinya akan mencoba menghidupkan kembali program yang sudah hampir tiga tahun tidak berjalan. Program tersebut khusus menuntaskan permasalahan kemiskinan di Kepri. Pemprov Kepri sebelumnya memiliki Tim Koordinasi Penuntasan Kemiskinan (TKPK), namun karena alasan tertentu program dan tim ini diberhentikan.

"Saya akan usulkan lagi untuk menghidupkan kembali tim ini, sebab keberadaan TKPK Provinsi Kepri penting, untuk menekan angka kemiskinan di Provinsi Kepri saat ini. Dan pemerintah sebelumnya juga telah terbukti dalam mengatasi kemiskinan ini," kata Isdianto.

● **reni hikmalia/  
ahmad rohmadi/sutana/  
iwan sahputra**



## Siswa Harus Menunggu Setengah Jam

**SEKUPANG** – Siswa SMAN 1 Batam yang tengah mengerjakan soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) terpaksa berhenti karena kabel listrik di

meteran terbakar, Senin (9/4). Mereka terpaksa menunggu selama 30 menit, hingga petugas PLN memperbaiki kabel listrik yang terbakar. Masalah yang ter-

jadi di hari pertama pelaksanaan UNBK ini sedikit membuyarkan konsentrasi siswa yang sedang mengikuti ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Kepala Sekolah SMAN 1 Batam, Muhammad Chaidir mengaku melihat stabilizer naik turun sekira pukul 09.05 dan menghentikan pelaksanaan UN-

BK di dua ruangan. "Saya langsung hubungi pihak PLN untuk mengecek, dan ternyata kabel di meteran terbakar," ujarnya.

Ke hal 12))

### DUGAAN KARTEL BIAYA LOGISTIK SINGAPURA-BATAM

## KPPU Tunggu Rekomendasi Kemenlu

**BATUAMPAR** – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih terus melakukan penyelidikan terkait dugaan permainan kartel peti kemas tujuan Batam-Singapura. Sebagian besar perusahaan jasa angkut logistik yang berdomisili di Singapura

membuat KPPU tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan, dan harus melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Kepala Kantor KPPU Daerah Batam, Akhmad Muhari mengatakan pihaknya masih mendalami dugaan adanya kartel

tersebut. Karena sebagian besar perusahaan tidak masuk dalam wilayah hukum di Indonesia, maka dibutuhkan kerjasama government to government antara Indonesia dengan Singapura.

"Meskipun ada indikasi dugaan kartel, kami saat ini

belum bisa menyimpulkan apa-apa. Kami masih mendalami ini," ujarnya, Senin (9/4).

KPPU Batam sebelumnya sudah meminta data terkait perusahaan jasa angkut logistik di Singapura. Namun karena sudah masuk dalam wilayah hu-

kum negara lain, maka pihaknya tentu harus menghormati aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Itu sebabnya KPPU mendorong Kemenlu untuk memfasilitasi kerja sama dengan otoritas Singapura.

Ke hal 12))

# Siswa Harus ...

((Dari hal 9

Tahun ini, SMAN 1 menggunakan empat ruangan untuk pelaksanaan UNBK. Dia menjelaskan, kebakaran kabel listrik mengakibatkan dua ruangan yang berisikan 80 siswa dihentikan sementara menunggu perbaikan listrik. "Ruang ujian ada empat. Satu ruangan diisi sekitar 40 siswa. Jumlah siswa kami yang mengikuti ujian ada 461 siswa," ujarnya.

Akibat dari kebakaran kabel listrik ini, siswa di dua kelas harus mengulang kembali ujian. Mereka diberikan waktu tambahan karena molornya waktu ujian yang sudah ditentukan di sesi pertama. "Ujian sesi pertama dimulai pada 07.30 sampai dengan 09.30. Kami harus menghubungi pusat untuk menambah waktu ujian," kata Chaidir.

Dia menjelaskan, dari 461 siswa SMAN 1 Batam yang mengikuti UNBK terbagi dua jurusan, jurusan IPA 283 siswa

dan jurusan IPS 178 siswa. "Selain kebakaran kabel listrik, UNBK di hari pertama tidak ada kendala lagi," ujarnya.

Jumlah komputer yang disediakan sebanyak 160 unit, dan dibagi menjadi empat ruangan. "Jadi pasti lah tiga sesi karena kita menggunakan empat ruangan," katanya.

Siswa jurusan IPA, Siti Anisa menjelaskan, ada satu siswa yang servernya tidak berfungsi, dan menunggu selama 30 menit untuk mengganti server dengan laptop. "Server komputer tidak bisa bekerja, jadi harus diganti dengan laptop," katanya.

Selain itu, tidak ada kendala lain dalam mengerjakan soal ujian UNBK mata pelajaran Bahasa Indonesia. "Yang buat bingung itu jawabannya mirip-mirip, jadi susah menjawab yang mana yang benar," kata Siti.

Dari 50 soal yang diujikan, ia mampu mengerjakan soal tanpa

kendala yang berarti, dan tidak ada soal esai yang diujikan. "Insy Allah saya yakin bisa mengerjakan semua, apalagi UNBK tidak menentukan kelulusan," ujarnya.

Selain SMAN 1, SMAN 3 Batam juga menggelar UNBK. Tahun ini, ada 361 siswa yang mengikuti ujian selama empat hari.

Kepala SMAN 3 Batam Vivi Kusuma Effendi mengatakan, pelaksanaan UNBK tahun ini menggunakan 5 ruang kelas dan dibagi 2 sesi ujian. "231 jurusan IPA, 112 jurusan IPS dan 18 jurusan Program Bahasa," katanya.

Menurut dia, pelaksanaan UNBK tidak terlalu asing lagi bagi SMA Negeri 3 Batam. Karena setiap ulangan harian para siswa selalu menggunakan sistem ujian berbasis komputer. "Sudah terbiasa, dan sebelum ujian sungguhan kami sudah laksanakan tryout sebanyak 4 kali," kata Vivi.

## Numpang di Sekolah Lain

Meski menerapkan sistem komputer, tak semua sekolah bisa melaksanakan ujian di sekolah masing-masing. SMAN 5 Batam salah satunya. Siswa yang berada di Sagulung ini tak memiliki fasilitas komputer lengkap. Alhasil siswa terpaksa menumpang ruang komputer milik SMKN 1 Batam di Batuaji.

Ketua Panitia UNBK SMAN 5 Batam Ermawalis mengatakan, ada 457 siswa yang mengikuti ujian. pelaksanaan UNBK pun dibagi menjadi tiga sesi karena terbatasnya ruangan yang ada. "Akhirnya harusnya menumpang karena sarana prasarana belum lengkap, meski begitu sejauh ini UNBK berjalan lancar," katanya.

Dia menambahkan, pengawas UNBK berasal dari beberapa guru SMA yang ada di Batam. Pemilihan pengawas pun sudah ditentukan dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah

(MKKS) beberapa waktu lalu.

Berbeda pula dengan siswa SMAN 17 Batam. Di saat teman-teman mereka di sekolah lain sudah menggunakan sistem komputer, sekolah yang terletak di Kaveling Bukit Seroja, Sagulung itu masih melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Hal ini lantaran sekolah yang baru berdiri enam tahun itu belum memiliki jumlah komputer yang memadai untuk pelaksanaan UNBK.

Kepala SMAN 17 Batam Tapi Winanti mengatakan, saat ini sekolahnya hanya memiliki enam unit komputer saja. Sehingga tak memungkinkan ujian nasional dilaksanakan dengan basis komputer. "Sarana dan prasarana belum memadai, maka untuk sementara 233 murid yang mengikuti ujian harus menggunakan kertas," katanya.

●romi kurniawan/  
fathurohim/  
dicky sigit rakasiwi

# Selesaikan Permasalahan Jalan Lingkungan

**SEKUPANG** – Pemko Batam fokuskan program Pemberdayaan Masyarakat Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) pada kegiatan pembangunan atau rehabilitasi jalan lingkungan dan drainase. "Permintaan banyak, tapi saya ambil yang terbanyak. Yang terbesar itu jalan setapak, drainase, maka Perwako saya buat dua itu, kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi saat meninjau pelaksanaan PM-PIK tahun anggaran 2017 di Kecamatan Sekupang, Senin (9/4).

Menurut dia, pembangunan

nantinya bisa ditambah, baik untuk posyandu, poskamling dan gedung serbaguna. Melalui program PM-PIK ini Rudi menargetkan jalan lingkungan bisa selesai di akhir masa jabatannya. Supaya pembangunan merata, tak hanya di jalan-jalan utama. "Kebijakan saya harus di atas Rp1 miliar dana PIK ini. Karena dari 2011 saya Wakil Wali Kota, keluhan Bapak Ibu itu saja, jalan berlubang, parit banjir," ujarnya.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh masyarakat

melalui kelompok kerja. Sedangkan dinas, kecamatan, dan kelurahan hanya pendampingan, mengawasi, dan membantu dalam hal pelaporan karena dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pekerjaan di lingkungan ini, tidak lagi dilaksanakan oleh dinas Pemko Batam karena volume kerja mereka sudah cukup besar. Selain itu dengan PM-PIK, masyarakat diberdayakan dalam proses pembangunan. "Saya haruskan yang mengerjakan masyarakat. Karena ini akan membantu eko-

nomi masyarakat," kata mantan anggota DPRD Batam ini.

Ia berharap untuk PM-PIK 2018 sudah mulai dikerjakan pada Juli mendatang. Agar pelaksanaannya selesai tepat waktu. Adapun besar anggaran yang disiapkan tahun ini senilai Rp 1,1 miliar per kelurahan. "Dulu pikir susah Rp1,1 miliar. Ternyata bisa juga. Tahun depan kami paksakan Rp1,3 miliar. Terkadang dipaksa itu perlu juga, tapi harus tepat," katanya.

Adapun jumlah kegiatan PIK di Sekupang pada tahun angga-

ran 2017 sebanyak 67 proyek. Terbagi di Kelurahan Tiban Indah 7 kegiatan, Tiban Lama 14 kegiatan, Patam Lestari 9 kegiatan, Seiharapan 15 kegiatan, Tiban Baru 6 kegiatan, Tanjunggriau 13 kegiatan, dan Tanjungpinggir 3 kegiatan.

Bentuk kegiatannya antara lain pembangunan atau rehabilitasi jalan, pembangunan gedung serbaguna, pembangunan atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, dan tembok penahan tanah.

# Dewan Kaji Perda Pajak Daerah

**BATAM KOTA** – Ketua DPRD Batam Nuryanto menegaskan, pihaknya akan melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Hal ini dilakukan agar Dewan memiliki dasar dalam mengambil keputusan, apakah menunda atau merevisi perda tersebut.

"Sudah saya disposisikan ke komisi II untuk ditindaklanjuti dengan melakukan kajian," ujarnya, Senin (9/4).

Dia mengatakan, telah menerima aspirasi dan menerima kedatangan pengusaha dari Asosiasi Spa Indonesia (Aspi) Kepri dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kepri, beberapa waktu lalu di DPRD Kota Batam. "Mereka minta pelaksanaan pajak ini ditunda dulu, karena kondisi ekonomi sedang lesu. Dan walaupun diterapkan, minta angka tidak 35 persen," kata Nuryanto.

Regulasi ini juga sudah dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus) dan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Jika terjadi revisi atau penundaan, sambungannya, perubahan juga akan terjadi pada Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), khususnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

"Padahal sewaktu pembahasan di Pansus, semua dilibatkan, termasuk pengusaha. Tapi ada yang datang dan ada yang tidak. Kadang yang datang juga perwakilannya," jelas politisi PDIP ini.

Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Edward Brando dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II meminta Pemko Batam melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



*Mereka minta pelaksanaan pajak ini ditunda dulu, karena kondisi ekonomi sedang lesu. Dan walaupun diterapkan, minta angka tidak 35 persen,*

**NURYANTO**  
Ketua DPRD Batam

(BP2RD) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam memberikan data akurat terkait menurunnya pendapatan Spa.

"Pertemuan kali ini belum bisa mengambil keputusan. Kami minta agar pemerintah menyajikan data akurat agar bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ditunda, mana datanya, kalau direvisi mana datanya," kata Edward.

Kepala Disbudpar Kota Batam, Pebrialin mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan sampel secara acak kepada 10 Spa di Kota Batam untuk melihat kunjungan wisatawan lokal dan asing pada tanggal 11-28 Maret. "Biasanya jumlah kunjungan 70 sampai 100 orang per hari. Saat ini kunjungan cuma sekitar 20 orang per hari," kata Pebrialin.

Pada umumnya, pelanggan Spa merupakan pekerja-pekerja asing yang bekerja di bidang industri. Tapi kunjungan itu berangsur menurun sesuai dengan banyaknya perusahaan yang gulung tikar. "Tentunya ini akan diperluas lagi sebagai perbandingan. Kami juga biasanya menggunakan data dari BPS (badan pusat statistik) sebagai referensi," katanya.